



Australian Government



REVISI RENCANA KERJA KOMPAK 2020

Mendukung Respons Pemerintah Indonesia terhadap COVID-19

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Pendahuluan

Pada 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat nasional¹. Keputusan Presiden ini mewajibkan seluruh otoritas terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi mengamankan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya keputusan ini, pemerintah pusat mengeluarkan panduan bahwa:

- Kementerian, institusi, dan pemerintah daerah harus mengalihkan fokus anggaran mereka ke sektor layanan kesehatan, pencairan dana sosial, dan stimulus ekonomi;
- Program jaring pengaman sosial harus diperluas; dan
- Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebagai mitra kunci pemerintah pusat dan daerah, KOMPAK berada di posisi yang kuat untuk mendukung respons tersebut. Oleh karena itu, KOMPAK, bekerja sama dengan DFAT dan mitra kementerian KOMPAK², telah menyusun revisi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020.

Pemilihan sektor penerima bantuan didasarkan pada area keunggulan komparatif KOMPAK, kesesuaian dengan strategi kegiatan unggulan KOMPAK, dan kebutuhan pemerintah Indonesia.



¹ Keputusan Presiden No. 11/2020 (Keppres No. 11/2020)

² Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tinjauan Revisi Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Revisi RKT ini menjabarkan dukungan KOMPAK atas respons pemerintah Indonesia terhadap COVID-19. Di dalamnya terdapat uraian tentang aktivitas KOMPAK, hasil dan dampak yang diharapkan dari respons tersebut, serta implikasinya terhadap anggaran.

Revisi RKT ini dibuat berdasarkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp80,9 miliar. Meskipun lebih besar dari anggaran semula, tetapi diperkirakan anggaran aktivitas RKT reguler berkurang Rp4,8 miliar dengan adanya perubahan kegiatan unggulan KOMPAK untuk merespons COVID-19, serta penyesuaian dalam mekanisme pemberian bantuan. Sementara itu, peningkatan anggaran disebabkan adanya tambahan Rp4 miliar yang dialokasikan DFAT kepada KOMPAK untuk mengantisipasi tugas-tugas khusus COVID-19 yang akan muncul (misalnya pengadaan darurat). Peningkatan ini juga mencakup dana bawaan sebesar Rp2,2 miliar dari tahun 2019. Anggaran untuk semester ke-2 tahun 2020 masih menunggu konfirmasi alokasi dana DFAT untuk Tahun Anggaran 2020/2021.

Revisi RKT ini didasarkan pada asumsi bahwa pembatasan sosial (misalnya kerja dari rumah) diterapkan hingga akhir Juni 2020. Setelah itu, pembatasan akan dilonggarkan secara bertahap sehingga lokakarya, pelatihan, dan kegiatan tatap muka rutin lainnya dapat dilaksanakan. Seluruh aktivitas KOMPAK akan tunduk pada peraturan nasional dan daerah serta kebijakan yang dikeluarkan oleh DFAT dan Abt.

KOMPAK telah mengidentifikasi tujuh sektor prioritas dalam menanggapi COVID-19:

Sektor	Prioritas COVID-19	Mitra kerja sama DFAT
Pengelolaan keuangan publik	Mendukung pemerintah daerah dalam merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merespons COVID-19;	PROSPERA BANGGA Papua: MAHKOTA, UNICEF
Penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati (PASH)	Memperkuat peran dan kapasitas fasilitator PASH desa dalam mengumpulkan data kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak COVID-19;	PEDULI, MAMPU
Penguatan kecamatan dan desa	Memperkuat peran dan kapasitas pemangku kepentingan kecamatan dan desa dalam merevisi dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk menangani COVID-19;	Bank Dunia (LSP), MAMPU
Sistem informasi desa	Memperbaiki proses pengumpulan dan penggunaan data kelompok masyarakat rentan dalam sistem informasi desa agar aktivitas respons terhadap COVID-19 lebih terarah;	Bank Dunia (LSP), MAHKOTA
Akuntabilitas sosial	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang COVID-19 dan meningkatkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat terhadap rencana dan implementasi anggaran untuk aktivitas respons terhadap COVID-19	MAMPU, Bank Dunia (LSP)
Keperantaraan pasar	Memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mendukung ketahanan ekonomi di tingkat desa; dan	PRISMA
Lintas sektor	Melihat potensi solusi digital untuk mengukur dan memitigasi dampak pandemi COVID-19. Mendukung pendataan dan analisis untuk memastikan penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat rentan menerima pelayanan yang memadai sebagai bagian dari respons COVID-19.	Bank Dunia (LSP), MAMPU, PEDULI

Implikasi terhadap RKT 2020

Aktivitas yang semula direncanakan dalam RKT 2020 tetap relevan tetapi akan menjadi prioritas kedua setelah aktivitas yang dijabarkan dalam revisi ini, hingga setelah pandemi COVID-19 berhasil diatasi³.

Disrupsi dan perubahan drastis pada prioritas program akibat pandemi COVID-19 ini akan berdampak pada jadwal pemberian bantuan yang terkait dengan tujuan pelembagaan dan tujuan akhir program KOMPAK.

KOMPAK akan terus mendukung mitra pemerintah melembagakan modelnya semaksimal mungkin, tetapi waktu serah terima mungkin akan terjadi lebih lama dari yang semula direncanakan.

Lingkungan kerja yang terbatas mengurangi kemampuan KOMPAK dalam mengadakan lokakarya atau memberikan bantuan teknis di lapangan. Hal ini juga menjadi tantangan baru dalam perencanaan kerja semula.

KOMPAK telah mencanangkan beberapa strategi yang akan dilakukan (misalnya metode penyampaian atau penyajian secara daring) agar dukungan tetap dapat disalurkan.

Memantau Kemajuan RKT 2020 dan Revisi RKT 2020

KOMPAK akan memantau kemajuan aktivitas dan indikator RKT dan revisi RKT melalui sistem pemantauan yang telah ada seperti tinjauan kinerja (yang dilakukan dari jarak jauh), *management information system* (termasuk untuk acara-acara daring penting), survei KOMPAK (d disesuaikan dengan situasi), dan sumber data sekunder.

Indikator dan target tambahan akan disusun untuk memantau aktivitas yang dijabarkan dalam revisi RKT ini.

³ Waktunya akan ditentukan melalui diskusi antara DFAT, kementerian, dan mitra subnasional.

Revisi Anggaran

Anggaran Tahunan Semula
(Jan-Des)

Rp 79,5 M

Anggaran Tahunan Revisi
(Jan-Des)

Rp 80,9 M

Variasi
(+1,7%)

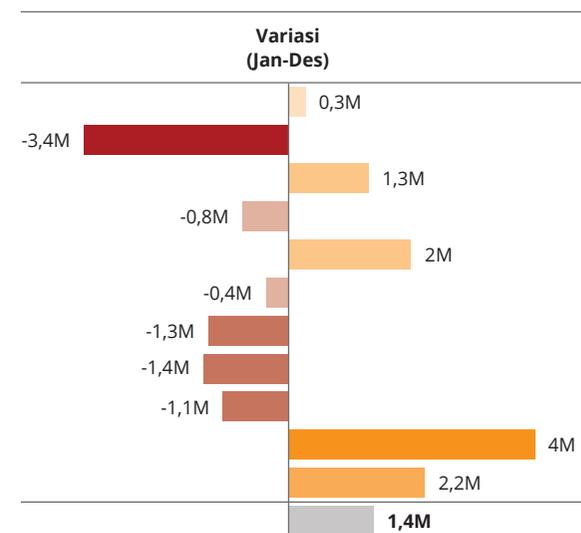
↑ Rp 1,4 M

CATATAN TENTANG VARIASI:

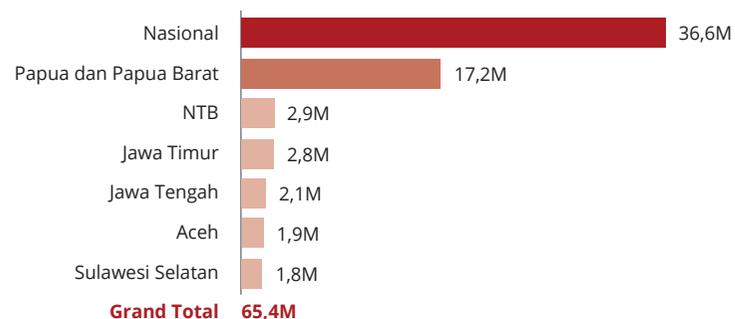
RKT revisi mencakup dana bawaan dari RKT 2019 sebesar Rp 2,2 M dan dana gugus tugas DFAT untuk respons COVID-19 sebesar Rp 4 M. Tanpa dana tambahan ini, RKT revisi seharusnya berkurang sebesar Rp 4,8 M

Berdasarkan Kegiatan Unggulan (dan dibandingkan dengan anggaran semula)

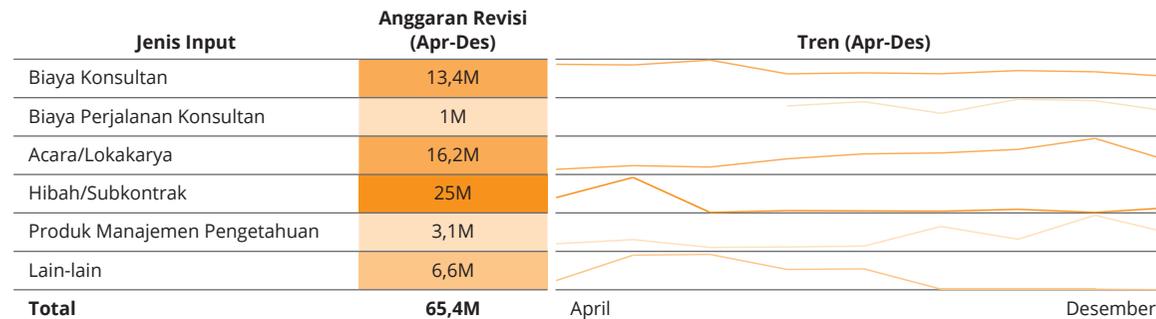
Poin Anggaran	Anggaran Semula (Jan-Des)	Pengeluaran (Jan-Mar)	Anggaran Revisi (Apr-Des)	Pengeluaran & Anggaran Revisi (Jan-Des)
1. Pengelolaan Keuangan Publik	12.484.248.819	1.543.429.645	11.206.205.890	12.740.635.535
2. Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati	12.336.080.162	831.423.660	8.152.174.424	8.983.598.084
3. Penguatan Kecamatan dan Desa	15.430.713.297	3.847.119.905	12.874.660.866	16.721.780.771
4. Sistem Informasi Desa	8.430.810.231	1.761.235.875	8.642.729.386	10.403.965.261
5. Akuntabilitas Sosial	5.599.687.220	2.392.984.450	2.830.045.944	5.223.030.394
6. Keperantaraan Pasar	4.762.878.045	429.432.680	2.986.431.956	3.415.864.636
7. Serah Terima (<i>phase-out</i>)	2.125.500.000	110.693.810	910.100.000	1.020.793.810
8. Tata Kelola	3.623.568.718	716.340.470	1.503.800.000	2.220.140.470
9. Lintas Sektor	14.741.552.562	1.720.400.695	12.250.422.818	13.970.823.513
10. Gugus Tugas DFAT untuk Respons COVID-19	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000
11. Dana Bawaan dari RKT 2019	0	2.205.210.300	0	2.205.210.300
Total	79.535.039.054	15.549.271.490	65.356.571.284	80.905.842.774



Berdasarkan wilayah kerja pemegang anggaran



Berdasarkan metode pemberian dukungan atau asistensi



PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

Prioritas 1: ► Pemerintah daerah merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merespons pandemi COVID-19

Aktivitas	Hasil	Dampak
<p>Apa yang kita lakukan? Dengan siapa? Di mana?</p>	<p>Apa yang kita hasilkan? Bagaimana kita bisa mengukur skala dan jangkauan?</p>	<p>Perubahan apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana kita tahu bahwa perubahan tersebut berhasil dilakukan?</p>
<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan tinjauan secara berkala atas kebijakan pemerintah Indonesia dalam perencanaan dan anggaran terkait COVID⁴ dan memberikan panduan kepada pemerintah kabupaten untuk menjalankannya. Menyusun panduan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang bagaimana kabupaten dapat mengalihkan fokus APBD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk merespons COVID-19. Memberikan bantuan teknis kepada Bappenas untuk meninjau formulasi dan implementasi DAK Fisik untuk menerapkan pembelajaran yang diperoleh dari respons terhadap COVID-19. <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten, antara lain dalam bentuk lokakarya dan dukungan langsung (<i>on-the-job support</i>) untuk: <ul style="list-style-type: none"> Merevisi APBD untuk merespons COVID-19, termasuk mengalokasikan ulang dana transfer fiskal⁵ dan merevisi alokasi standar pelayanan minimal (SPM). Menyusun standard operating procedure (SOP) kabupaten tentang anggaran respons terhadap COVID-19. Merevisi RKPD kabupaten 2020 dan menyusun RKPD 2021 agar mencakup respons terhadap COVID-19 dan sasaran SPM. Memberikan input teknis untuk merevisi strategi komunikasi BANGGA Papua dan materi untuk menanggapi COVID-19. 	<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkembangan terbaru terkait perencanaan dan kebijakan anggaran Pemerintah Indonesia untuk COVID-19 diberikan secara berkala kepada (sekurang-kurangnya 24) pemerintah kabupaten. Panduan mengenai bagaimana pemerintah kabupaten dapat mengalihkan fokus APBD dan RKPD untuk merespons COVID-19 disusun dan diterbitkan oleh Kemendagri. Laporan (atau presentasi) mengenai formula dan dampak implementasi DAK Fisik untuk merespons COVID-19 diberikan kepada Bappenas. <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 24 kabupaten (dan sekurang-kurangnya 10 perwakilan pemerintah per kabupaten) menerima pelatihan mengenai perencanaan, anggaran, dan koordinasi untuk merespons COVID-19. Sebanyak 24 pemerintah kabupaten telah: <ul style="list-style-type: none"> Mengubah APBD untuk mengalokasikan dana respons terhadap COVID 19. Menerbitkan SOP kabupaten tentang pengeluaran dana untuk menanggapi COVID-19. Mengubah RKPD 2020 untuk menanggapi COVID-19. Menyusun RKPD 2020 dengan aktivitas respons terhadap COVID-19 dan SPM. BANGGA Papua mulai mengirim pesan terkait COVID-19 sebagai bagian dari strategi komunikasinya. 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk merespons COVID-19, pemerintah kabupaten telah: <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dana untuk aktivitas respons terhadap COVID-19. Menyusun rencana dengan sasaran yang lebih terarah Menyusun rencana dan kebijakan anggaran yang lebih konsisten. Pemerintah kabupaten telah: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang perencanaan, anggaran, dan koordinasi upaya respons. Memiliki akses yang lebih baik ke informasi tentang perencanaan dan kebijakan anggaran pemerintah pusat dan kabupaten. Pemangku kepentingan dan penerima manfaat BANGGA Papua menerima informasi yang lebih berkualitas tentang respons dan mekanisme pencegahan COVID-19.

⁴ Mencakup MSS, instrumen transfer fiskal {DAK Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID)}, serta dokumen perencanaan (RKPD dan lainnya).

⁵ DAK Fisik dan Non Fisik, DID

PENGUATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN STATISTIK HAYATI YANG INKLUSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB

Prioritas 2: ► Memperkuat peran dan kapasitas fasilitator PASH untuk mendukung pengumpulan data masyarakat rentan yang terdampak pandemi COVID-19 (dilakukan bersama dengan Prioritas 4: Memperbaiki proses pengumpulan dan penggunaan data kelompok masyarakat rentan dalam sistem informasi desa agar aktivitas respons COVID-19 lebih tepat sasaran)

Aktivitas	Hasil	Dampak
<p>Apa yang kita lakukan? Dengan siapa? Di mana?</p>	<p>Apa yang kita hasilkan? Bagaimana kita bisa mengukur skala dan jangkauan?</p>	<p>Perubahan apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana kita tahu bahwa perubahan tersebut berhasil dilakukan?</p>
<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis: <ul style="list-style-type: none"> Situasi PASH terhadap dan terkait COVID-19. Risiko dan strategi mitigasi PASH terkait COVID-19 untuk anak-anak dan kelompok masyarakat rentan. Memberikan bantuan teknis kepada Bappenas untuk meninjau, menyusun, atau memberikan input teknis dalam dokumen kebijakan terkait PASH⁶ untuk merespons COVID-19. <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan teknis kepada pemangku PASH kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengoordinasikan pengumpulan data atas populasi kelompok masyarakat miskin dan rentan yang terdampak COVID-19. Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah desa untuk memperbarui data kelompok masyarakat miskin dan rentan, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Memperbarui data sistem informasi desa. Daftar penerima manfaat program bantuan sosial diterbitkan dan ditandatangani oleh BPD. Memberikan pelatihan kepada fasilitator PASH desa mengenai cara mengenali dan mengumpulkan data populasi kelompok masyarakat rentan yang terdampak COVID-19. 	<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan (atau presentasi) singkat mengenai: <ul style="list-style-type: none"> Dampak situasi COVID-19 terhadap PASH. Risiko dan strategi mitigasi PASH terhadap anak-anak dan kelompok masyarakat rentan. Membuat laporan (atau presentasi) singkat mengenai: <ul style="list-style-type: none"> Memahami kerentanan dalam sistem PASH di Indonesia: Rekomendasi definisi dan karakteristik kelompok masyarakat rentan. Panduan untuk layanan penjangkauan administrasi penduduk untuk populasi kelompok masyarakat rentan dan kelompok khusus. <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat dan menerapkan materi pelatihan bagi fasilitator PASH untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan dalam mengumpulkan data populasi rentan yang terdampak COVID-19. Sekurang-kurangnya 70 fasilitator PASH desa telah menerima pelatihan tentang cara mengenali dan mengumpulkan data populasi kelompok masyarakat rentan yang terdampak COVID-19 (25% desa dengan fasilitator PASH). 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin banyak kelompok masyarakat miskin dan rentan yang teridentifikasi, terdokumentasi, dan menerima manfaat bantuan sosial. Himpunan data (<i>dataset</i>) untuk populasi rentan menjadi lebih lengkap dan akurat sehingga program bantuan sosial dapat lebih terarah.

⁶ Mencakup peraturan, protokol, dan panduan.

PENGUATAN KECAMATAN DAN DESA

Prioritas 3: ► Memperkuat peran dan kapasitas pemangku kepentingan di kecamatan dan desa dalam merevisi dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk menangani COVID-19

Aktivitas	Hasil	Dampak
<p>Apa yang kita lakukan? Dengan siapa? Di mana?</p>	<p>Apa yang kita hasilkan? Bagaimana kita bisa mengukur skala dan jangkauan?</p>	<p>Perubahan apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana kita tahu bahwa perubahan tersebut berhasil dilakukan?</p>
<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan teknis kepada Kemendagri untuk: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Menyusun dan mengeluarkan kebijakan untuk merevisi APB Desa sebagai respons terhadap COVID-19. ◦ Menyusun panduan untuk Camat dalam memantau dan menanggapi COVID-19. ◦ Menyusun panduan untuk fasilitator PTPD dalam merevisi APB Desa dan memfasilitasi transfer tunai dari dana desa (BLT-Dana Desa) ke kelompok masyarakat rentan. <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan teknis untuk kabupaten dan kecamatan (camat dan fasilitator PTPD) dalam menanggapi COVID-19. Melalui keduanya, desa akan didukung untuk: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Merevisi anggaran desa (APB Desa). ◦ Memfasilitasi transfer tunai ke kelompok rentan dari dana desa (BLT-Dana Desa). ◦ Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas (mempublikasikan perubahan anggaran secara daring, penerima manfaat transfer tunai, membuat mekanisme pengawasan atau pengaduan). ◦ Melakukan perencanaan bersama dengan fasilitas kesehatan (hanya di Papua dan Papua Barat). 	<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri tentang revisi APB Desa dalam menanggapi COVID-19. • Panduan yang disusun dan disetujui oleh Kemendagri bagi: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Camat untuk memonitor dan menanggapi respons terhadap COVID-19. ◦ Fasilitator PTPD untuk merevisi APB Desa dan memfasilitasi transfer tunai ke kelompok masyarakat rentan dari dana desa (BLT-Dana Desa). <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 24 pemerintah kabupaten dan 43 pemerintah kecamatan telah menerima pelatihan dan bantuan teknis untuk mendukung desa-desa dalam menanggapi COVID-19. • Semua desa KOMPAK memiliki: <ul style="list-style-type: none"> ◦ APB Desa yang sudah direvisi untuk menanggapi COVID-19. ◦ Revisi APB Desa yang sudah dipublikasi di ruang publik (situs web, papan pengumuman desa atau sejenisnya). ◦ Pengetahuan tentang protokol transfer tunai dan pentingnya pengaturan transparansi/akuntabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih banyak pendanaan desa yang tersedia untuk menanggapi COVID-19. • Pendanaan desa ditargetkan dengan lebih baik untuk mendukung kelompok masyarakat rentan yang akan atau paling terdampak COVID-19. • Pemerintah daerah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik mengenai cara penyusunan rencana dan anggaran sebagai respons terhadap COVID-19 yang efektif.

SISTEM INFORMASI DESA

Prioritas 4: ► Memperbaiki proses pengumpulan dan penggunaan data kelompok masyarakat rentan dalam sistem informasi desa agar aktivitas respons terhadap COVID-19 lebih tepat sasaran (dilakukan bersama dengan Prioritas 2: Memperkuat peran dan kapasitas fasilitator PASH dalam mengumpulkan data kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak COVID-19)

Aktivitas	Hasil	Dampak
<p>Apa yang kita lakukan? Dengan siapa? Di mana?</p>	<p>Apa yang kita hasilkan? Bagaimana kita bisa mengukur skala dan jangkauan?</p>	<p>Perubahan apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana kita tahu bahwa perubahan tersebut berhasil dilakukan?</p>
<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun panduan dengan Bappenas tentang pengumpulan data untuk sistem informasi desa terkait kelompok masyarakat miskin dan rentan. <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberi pelatihan dan bantuan teknis kepada pemerintah desa untuk: <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sistem informasi desa untuk memungkinkan penyimpanan himpunan data populasi kelompok masyarakat rentan. Memperbarui himpunan data desa untuk kelompok rentan (dan kelompok rentan baru, misalnya pendatang dan orang-orang tanpa pekerjaan). Mengumpulkan dan melaporkan data yang spesifik terkait COVID-19 termasuk melalui metode pengumpulan data jarak jauh (formulir/aplikasi) 	<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Panduan yang disusun dan disetujui oleh Bappenas tentang pengumpulan data dari populasi kelompok masyarakat miskin dan rentan untuk sistem informasi desa selama merespons COVID-19. <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Semua desa KOMPAK (426 desa) memiliki: <ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi desa yang memungkinkan penyimpanan data populasi kelompok masyarakat rentan. Data terkini tentang kelompok masyarakat rentan. Kemampuan untuk mengumpulkan dan melaporkan data COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> Bappenas dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memiliki data lebih akurat tentang respons terhadap COVID-19 di tingkat desa. Desa-desa memiliki lebih banyak himpunan data terkini tentang kelompok rentan sehingga lebih banyak orang menerima program bantuan sosial untuk memitigasi dampak COVID-19. Pemerintah daerah memiliki akses terhadap data terkait COVID-19 dari pemerintah desa sehingga memiliki informasi untuk mengambil keputusan.

AKUNTABILITAS SOSIAL

Prioritas 5: ► Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang COVID-19 serta pengawasan BPD dan masyarakat terhadap rencana dan implementasi anggaran untuk aktivitas respons terhadap COVID-19

Aktivitas	Hasil	Dampak
<p>Apa yang kita lakukan? Dengan siapa? Di mana?</p>	<p>Apa yang kita hasilkan? Bagaimana kita bisa mengukur skala dan jangkauan?</p>	<p>Perubahan apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana kita tahu bahwa perubahan tersebut berhasil dilakukan?</p>
<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun panduan dengan Kemendesa PDTT (atau Kemendagri) bagi BPD untuk mengawasi program respons terhadap COVID-19 yang didanai APB Desa di desa tersebut. <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan teknis ke desa, anggota BPD, dan anggota masyarakat untuk mengawasi program respons terhadap COVID-19 yang didanai APB Desa, termasuk menggunakan panduan dan mekanisme penanganan keluhan. Mendukung jaringan PEKKA (kelompok perempuan dan Alumni Paradigta) untuk: <ul style="list-style-type: none"> Mendistribusikan informasi dan materi⁷ pencegahan ke anggota masyarakat untuk menanggapi COVID-19. Mendukung pemerintah desa untuk mendistribusikan bantuan sosial (misalnya bantuan tunai) dan untuk meningkatkan akurasi data bantuan sosial sebagai bagian dari respons terhadap COVID-19. Memberikan dukungan kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk mendistribusikan materi komunikasi tentang kesadaran dan respons terhadap COVID-19 di Papua dan Papua Barat. 	<p>Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Panduan BPD disusun dan disetujui oleh Kemendesa PDTT untuk BPD dalam mengawasi program respons terhadap COVID-19 yang didanai APB Desa di desa tersebut. Panduan BPD diimplementasikan di berbagai lokasi KOMPAK (idealnya secara nasional). <p>Subnasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Setidaknya 20 desa didukung agar memiliki: <ul style="list-style-type: none"> Pengawasan program COVID-19 yang didanai APB Desa menggunakan panduan BPD. Adanya mekanisme penanganan keluhan yang berfungsi dengan baik untuk menanggapi COVID-19. Lebih dari 200 desa menerima informasi dan materi pencegahan untuk menanggapi COVID-19 melalui jaringan PEKKA. 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan Dana Desa yang lebih efektif dan bertanggung jawab untuk menanggapi COVID-19. Kualitas program COVID-19 yang lebih baik pada tingkat desa di berbagai lokasi KOMPAK dan lokasi lainnya yang menggunakan perangkat/metode KOMPAK. Bertambahnya pengetahuan dan akses masyarakat terhadap materi pencegahan dan bantuan sosial untuk menanggapi COVID-19. Anggota masyarakat dapat mengajukan keluhan kepada pemerintah desa dan mendapat tanggapan sehubungan dengan kegiatan penanganan COVID-19.

⁷ Gel pembersih tangan (*hand sanitiser*), masker, pamflet, makanan pokok (tergantung lokasi dan kebutuhan)

KEPERANTARAAN PASAR

Prioritas 6: ► Menguatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mendukung ketahanan ekonomi pada tingkat desa

Aktivitas	Hasil	Dampak
<p>Apa yang kita lakukan? Dengan siapa? Di mana?</p>	<p>Apa yang kita hasilkan? Bagaimana kita bisa mengukur skala dan jangkauan?</p>	<p>Perubahan apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana kita tahu bahwa perubahan tersebut berhasil dilakukan?</p>
<p>Panduan BUMDES di kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun panduan dengan Kemendesa PDPT tentang bagaimana BUMDES dapat dirancang untuk mendistribusikan bahan kebutuhan pokok ke kelompok masyarakat rentan di desa-desa. Memberikan bantuan dan pelatihan teknis kepada pemerintah kabupaten untuk mengadopsi panduan tentang BUMDES. <p>Perdagangan elektronik (e-commerce)</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelatihan daring tentang <i>e-commerce</i>⁸ kepada pemilik usaha mikro dan kecil (UMK) dan pemerintah kabupaten. <p>Alat penilaian Usaha Mikro dan Kecil (UMK)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan mengimplementasikan alat penilaian tentang dampak COVID-19 pada UMK (alat penilaian UMK). 	<p>Panduan BUMDES di kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> Panduan BUMDES kabupaten yang sudah distandardisasi yang disusun dan disetujui oleh Kemendesa PDPT. Sebanyak tujuh pemerintah kabupaten mengadopsi panduan kabupaten BUMDES. Pemerintah kabupaten dan desa menerima pelatihan tentang panduan BUMDES di kabupaten {di tujuh kabupaten untuk para petugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)}. <p>Perdagangan elektronik (e-commerce)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemilik UMK dan pemerintah kabupaten mendapat pelatihan tentang <i>e-commerce</i> (di tujuh kabupaten dan paling sedikit 20 di setiap kabupaten). <p>Alat penilaian Usaha Mikro dan Kecil (UMK)</p> <ul style="list-style-type: none"> Alat penilaian tentang dampak COVID-19 di UMK telah dikembangkan. Sebanyak tujuh pemerintah kabupaten dilatih untuk menggunakan alat penilaian UMK. Sebanyak 14 kelompok bisnis di berbagai lokasi KOMPAK menggunakan alat penilaian UMK. 	<p>Meningkatkan pendapatan UMK dan ketersediaan dana</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pendapatan dari pemilik UMK prasejahtera. Ini termasuk: <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penggunaan transfer tunai pemerintah melalui UMK setempat dan BUMDES. Menambah jumlah pemilik bisnis UMK prasejahtera yang dapat menjual produk mereka melalui BUMDES. Menambah jumlah pemilik bisnis UMK prasejahtera yang dapat menjual produk mereka secara daring. Meningkatkan akses ke pasar keuangan bagi pemilik bisnis UMK. <p>Meningkatkan pendapatan pemerintah desa</p> <ul style="list-style-type: none"> Menambah pendapatan BUMDES untuk mendukung pemerintah desa.

⁸ Pelatihan telah dikembangkan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

LINTAS SEKTOR

Prioritas 7: ► Menjajaki solusi digital untuk mengukur dan memitigasi dampak pandemi COVID-19

Prioritas 8: ► Memastikan penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan menerima layanan yang memadai sebagai bagian dari respons terhadap COVID-19

Aktivitas	Hasil	Dampak
<p>Apa yang kita lakukan? Dengan siapa? Di mana?</p>	<p>Apa yang kita hasilkan? Bagaimana kita bisa mengukur skala dan jangkauan?</p>	<p>Perubahan apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana kita tahu bahwa perubahan tersebut berhasil dilakukan?</p>
<p>Analisis digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam kemitraan dengan Bappenas, mencari peluang untuk menggunakan data mobilitas dan transaksi untuk membantu aktivitas respons terhadap COVID-19 (dan jika dimungkinkan, melakukan analisis dan membuat <i>live dashboard</i>). <p>Survei dampak COVID-19 untuk penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> Berkolaborasi dengan Bappenas dan beberapa organisasi masyarakat disabilitas untuk: <ul style="list-style-type: none"> Memberikan input terhadap survei daring tentang dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 terhadap penyandang disabilitas dan membantu kajian sosial ekonomi dari hasil survei tersebut. Mengembangkan panduan untuk pemerintah desa dan masyarakat untuk memitigasi dampak dari COVID-19 pada penyandang disabilitas. <p>Tinjauan GESI tentang kebijakan dan dokumen lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Meninjau dan memberikan masukan teknis terkait komponen GESI untuk pedoman dan dokumen relevan lainnya yang dikembangkan oleh KOMPAK dalam menanggapi COVID-19. 	<p>Analisis digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan <i>dashboard</i> yang memungkinkan analisis data mobilitas di seluruh Indonesia (berbasis peta). Menyiapkan laporan (atau presentasi) untuk menunjukkan analisis pertanyaan-pertanyaan penting yang diidentifikasi oleh Bappenas (misalnya kepatuhan terhadap kebijakan pembatasan sosial/ PSBB, migrasi lintas wilayah, kenaikan harga, penimbunan kebutuhan dasar, dll.). <p>Survei dampak COVID-19 untuk penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan dibuat dengan temuan dan rekomendasi utama. Webinar diadakan dengan pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan hasil. Panduan yang dikembangkan dan disahkan oleh Bappenas dan berbagai organisasi disabilitas untuk pemerintah desa dan masyarakat dalam memitigasi dampak COVID-19 pada penyandang disabilitas. <p>Tinjauan GESI tentang kebijakan dan dokumen lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Masukan diberikan untuk berbagai panduan dan dokumen. 	<p>Analisis digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Bappenas memiliki kapasitas lebih baik untuk menggunakan analisis maha data (<i>big data</i>) untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih baik dalam menangani dampak COVID-19. Bappenas dan instansi pemerintah Indonesia lainnya (termasuk pemerintah daerah) dapat mengambil kebijakan terkait COVID-19 dengan informasi yang memadai (misalnya penentuan target program bantuan sosial yang lebih baik). <p>Survei dampak COVID-19 untuk penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> Bappenas memiliki informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak COVID-19 terhadap penyandang disabilitas di wilayah kerja KOMPAK. Bappenas dan instansi pemerintah Indonesia lainnya (termasuk pemerintah daerah) dapat mengambil kebijakan dengan informasi yang memadai berdasarkan analisis dampak COVID-19 terhadap penyandang disabilitas di berbagai lokasi kerja KOMPAK dan provinsi lainnya. Meningkatkan kesadaran antara pemerintah desa dan masyarakat tentang dampak COVID-19 dan cara membantu penyandang disabilitas. <p>Tinjauan GESI tentang kebijakan dan dokumen lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Panduan yang sudah direvisi dan dokumen relevan lainnya, terutama terkait penanganan masalah-masalah GESI dalam menanggapi COVID-19.